



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HAMDAN**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **441165**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.615.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m²/36 m² di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 20.000 m² di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 19.829 m² di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
4. Tanah Seluas 2.650 m² di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 250 m² di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 307 m²/210 m² di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 890.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **157.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS LOW SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 147.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **86.600.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.725.241
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.862.825.241
III. HUTANG	Rp.	444.372.344
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.418.452.897

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SURYA EFITRIMEN**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **458734**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	860.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/200 m2 di KAB / KOTA AGAM, HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	263.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, KAWASAKI SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
4. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000		
5. MOBIL, NISSAN SERENA 2.0 HWS AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
6. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	710.000.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.256.765
F. HARTA LAINNYA	Rp.	85.500.000
Sub Total	Rp.	1.927.256.765



III. HUTANG

Rp. 77.784.171

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.849.472.594

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRZAL ZAMZAMI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 631583

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/188 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	88.834.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	588.634.000
III. HUTANG	Rp.	21.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	567.034.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MEDO PATRIA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 641762

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	50.500.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	670.000.000
III. HUTANG	Rp.	138.036.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	531.964.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JONS MANEDI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 648030

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	81.000.000
1. MOBIL, AVANZA G Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	32.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	113.000.000
III. HUTANG	Rp.	22.524.420
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	90.475.580

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ORY SATIVA SYAKBAN**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **648072**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	950.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/15 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/19 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	258.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
3. MOBIL, YARIS 1.5 S CVT 1.5 S CVT/ TOYOTA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
4. MOTOR, BEAT NC11BF1D AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	150.000.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.408.500.000



III. HUTANG

Rp. 180.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.228.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.